

Keberpihakan Pemerintah pada UMKM di Era New Normal¹

Riduan Mas'ud

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

Emai: Riduanmasud@uinmataram.ac.id

1. Pendahuluan

Pentingnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian Indonesia telah ditunjukkan oleh ketahanan mereka selama krisis ekonomi sebelumnya serta kontribusi mereka terhadap perekonomian bangsa secara keseluruhan. UMKM telah menunjukkan ketahanan di masa lalu selama gejolak ekonomi, seperti krisis keuangan Asia 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008-2009 (Sandee, Andadari & Sulandjari 2000; Mavrodieva dkk. 2019). Namun, wabah COVID-19 pada Maret 2020 telah menyebabkan UMKM di seluruh dunia mengalami krisis ekonomi dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi (Cowling, Brown & Rocha 2020). Operasi komersial offline UMKM terhambat oleh penurunan aktivitas dan pergerakan orang yang disebabkan oleh ketakutan akan penularan virus dan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah (Reardon et al. 2020).

Baldwin dan di Mauro (2020) menunjukkan bagaimana pandemi mempengaruhi sisi penawaran pasar (seperti bahan mentah dan migrasi tenaga kerja) serta sisi permintaan (yaitu, daya beli konsumen). Akibatnya, pandemi berdampak signifikan pada bisnis UMKM, sehingga pendapatan menurun atau penutupan perusahaan. Menurut ILO (2020), 68 persen UMKM di Indonesia menghadapi gangguan operasional bisnis di tahap awal pandemi, 65 persen menghentikan operasional, dan 3 persen gulung tikar. Selain itu, ABDSI (2020) mencatat bahwa di Indonesia, 48,3 persen UMKM kesulitan mempertahankan rantai pasokannya, 92,6 persen membutuhkan restrukturisasi utang, dan 26,6 persen memiliki masalah arus kas yang berujung pada utang. Mayoritas dari mereka yang melanjutkan bisnis kehilangan sebagian besar pendapatan mereka, sementara 28% kehilangan setengah dari pendapatan mereka. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk melihat dampak pandemi terhadap UMKM, baik secara global maupun di Indonesia (lihat, misalnya, ILO 2020; ABDSI 2020; Gunadi et al. 2021; UNDP & LPEM FEBUI 2020; Bank Dunia & Bappenas 2021; Tambunan 2020). Tetapi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap topik-topik berikut: (1) sejauh mana strategi internal UMKM menghadapi pandemi; (2) sentimen pemulihan ekonomi UMKM; (3) strategi pemulihan usaha UMKM; (4) strategi transformasi bisnis UMKM dalam mengantisipasi lanskap bisnis pascapandemi; dan (5) Mengidentifikasi dukungan pemerintah yang diperlukan untuk memfasilitasi pemulihan dan transformasi bisnis UMKM.

Terlepas dari kenyataan bahwa sejumlah penelitian telah melihat bagaimana pandemi telah mempengaruhi UMKM di Indonesia, masih ada celah dalam tubuh literatur yang ada yang perlu diisi, yang juga menyoroti kontribusi penelitian ini. Pertama, penelitian ini akan mengumpulkan beberapa literatur dan kemudian membuat narasi dari proses tinjauan literatur. Kedua, efisiensi inisiatif dukungan pemerintah selama epidemi sebagian besar diperiksa sebagian dalam penelitian yang tersedia saat ini.

2. UMKM Indonesia Sebelum Pandemi

Setelah Krisis Keuangan Asia (AFC) tahun 1998, mayoritas UMKM Indonesia lebih mampu mempertahankan operasi bisnis mereka daripada pesaing mereka yang lebih besar (terWengel & Rodriguez, 2006; Mavrodieva et al., 2019). Metode produksi manual dan peralatan produksi skala kecil mereka terutama bertanggung jawab atas ketahanan mereka. Krisis mata uang dan nilai tukar kurang

¹ Disampaikan pada Webinar Nasional, Keberpihakan Pemerintah dan Perbankan pada UMKM di Era New Normal, 29 Juni 2020, yang diselenggarakan oleh PMMI Kota Mataram

berdampak pada UMKM karena mereka kurang bergantung pada investasi luar, terutama asing, untuk mempertahankan operasi bisnis mereka. Sebelum pandemi, UMKM mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan membentuk 99,9 persen badan usaha dan 96,92 persen dari seluruh penyerapan tenaga kerja, namun kontribusinya terhadap PDB, investasi, dan ekspor kurang signifikan (60,51 persen, 60,03 persen). persen, dan 15,65 persen, masing-masing) (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Akibatnya, terutama ada dua aliran penelitian dalam penyelidikan sebelumnya. Bidang studi pertama berkonsentrasi pada upaya perluasan operasi bisnis UMKM, termasuk namun tidak terbatas pada akses pembiayaan (lihat, misalnya, Rosavinaet al., 2019; Susan, 2020; Revindo & Gan, 2017) dan efektivitas pemerintah dukungan (lihat misalnya Hill, 2002; Tambunan, 2007; Revindo et al., 2019a,c). Area penelitian kedua meneliti internasionalisasi UMKM, dengan perhatian khusus pada jaringan, akses pasar, kewirausahaan, dan daya saing produk (lihat, misalnya, Tambunan, 2009; Revindo et al., 2017,2019b;ter Wengel & Rodriguez, 2006; Sulistiyani & Rahardja, 2018; Rekarti dkk., 2018; Bhasin & Venkataramany, 2010).

3. UMKM Indonesia Saat Pandemi

Penelitian awal tentang efek pandemi pada UMKM masih sedikit. Namun demikian, semakin banyak penelitian utama tentang dampak pandemi telah dilakukan di banyak tempat dari waktu ke waktu ketika individu menyesuaikan diri dengan peraturan dan batasan yang berubah. UMKM telah terkena dampak negatif dari pandemi di banyak negara. Antara Februari 2020 dan April 2021, UKM di 32 negara kehilangan antara 70 dan 80 persen dari pendapatan mereka (OECD 2021). Dampak pandemi terhadap permintaan dan penawaran mempengaruhi UMKM yang memasok bahan baku olahan, komponen, suku cadang, barang penolong, barang setengah jadi, dan input lainnya selain UMKM yang memproduksi barang jadi. UMKM di Pakistan harus menghadapi tantangan keuangan, masalah rantai pasokan, penurunan permintaan, dan penurunan penjualan dan keuntungan (Shafi, Liu & Ren 2020). Lebih dari dua pertiga dari peserta survei mengatakan mereka tidak akan mampu bertahan dalam kurungan selama dua bulan. Sebagian besar orang tidak memiliki strategi atau persiapan apa pun untuk skenario pandemi. Mayoritas UMKM di distrik Batticaloa Sri Lanka mengalami penurunan produktivitas, kenaikan biaya material, tantangan pemasaran dan penjualan, serta gangguan dalam komunikasi pelanggan (Santhirakumar, Narmilan & Puvanitha 2021). Kinerja UMKM di Nigeria juga terkena dampak negatif dari deklarasi keadaan darurat dan penangguhan operasi ekonomi (Ambrose 2021). Dari sisi dampak ekonomi jangka menengah, kebijakan program subsidi pemerintah berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup UMKM. Selama beberapa bulan pertama pandemi, UMKM di negara berkembang Asia mengalami penurunan pendapatan penjualan dan pengurangan staf (Sonobe et al. 2021).

Ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan langkah-langkah signifikan COVID-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah 21/2020 pada 31 Maret 2020, epidemi COVID-19 di sana resmi dimulai. Kebijakan tersebut, yang meliputi (1) isolasi sosial dan fisik, (2) belajar dan bekerja dari rumah, dan (3) penghentian sementara kegiatan di sektor non-strategis berdampak pada UMKM. Kegiatan usaha UMKM, yang terutama terdiri dari bisnis offline dan industri padat karya, secara otomatis terpengaruh karena pemerintah dan pemerintah daerah memerintahkan mereka untuk menghentikan sementara atau membatasi kegiatan komersial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sisi penawaran pasar terpengaruh. Jika dibandingkan dengan bisnis yang lebih besar, UMKM terkena dampak terburuk dari dampak ekonomi langkah-langkah COVID-19 pada awalnya. Ketidakmampuan UMKM untuk menetapkan langkah-langkah physical distancing atau protokol kesehatan yang tepat di tempat kerja, serta kegagalan mereka untuk menerapkan kerja jarak jauh di wilayah kerjanya, menyebabkan ketidakterersediaan fisik pekerja. Karena pembatasan yang ketat, beberapa karyawan juga tidak dapat melakukan perjalanan ke kantor perusahaan. Menurut jajak pendapat ILO (2020), hampir 70% UMKM Indonesia berhenti beroperasi, baik untuk sementara maupun permanen (The Strait Times2020). Banyak UMKM yang mengakui bahwa kekurangan tenaga kerja disebabkan oleh hambatan fisik yang menghalangi sekitar setengah dari karyawan mereka untuk bekerja (UNIDO 2021)

Karena ketergantungan mereka yang besar pada ekonomi tunai dan penjualan offline, UMKM merasa sulit untuk menghasilkan uang selama epidemi, terutama selama kebijakan isolasi sosial yang ketat. Permintaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM, yang secara tradisional melayani anak sekolah dan populasi tenaga kerja, mau tidak mau menurun karena sekolah beralih ke instruksi online dan sebagian besar tempat kerja menyesuaikan kebijakan mereka untuk memungkinkan bekerja dari rumah (WFH). Dengan 82 persen perusahaan yang disurvei mengakui pengurangan jumlah pesanan dan 92 persen mengantisipasi penurunan pendapatan, sebagian besar perusahaan mengklaim bahwa penurunan permintaan pasar adalah kekhawatiran terbesar selama periode ini (UNIDO 2021). Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa 81% bisnis memperkirakan penurunan penjualan 50% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Karena penurunan permintaan yang signifikan untuk produk dan layanan yang ditawarkan oleh UMKM selama pandemi, terutama dengan penerapan penguncian, hal ini menyebabkan ke-krisis arus kas.

Semua jenis pembayaran, termasuk upah dan gaji, bunga, pembayaran kembali pinjaman, dan pajak, telah terkena dampak dari kurangnya arus kas (Gunadi et al. 2021). Mereka dipaksa oleh masalah keuangan untuk memotong staf, menunda pembayaran bunga dan pinjaman, dan mengambil tindakan lain. Agar usahanya tetap berjalan, banyak UMKM yang harus melakukan negosiasi dengan bank, pemasok, dan karyawan.

Ketenagakerjaan telah terkena dampak negatif oleh arus keuangan UMKM yang lebih rendah. Khususnya selama tahun pertama pandemi, banyak pekerja Indonesia yang kehilangan pekerjaan. Untuk memenuhi permintaan pasar pascapandemi saat ini untuk produk mereka, banyak UMKM mulai menghentikan atau mengurangi operasi mereka. Mayoritas bisnis menekankan bahwa mereka tidak dapat bertahan dari pembatasan pandemi awal yang ketat selama lebih dari enam bulan (UNIDO 2021). Survei terhadap 5.800 usaha kecil di Indonesia pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa hampir semua penutupan sementara—43 persen di antaranya—disebabkan oleh COVID-19 (Bartik et al. 2020). Penurunan lebih lanjut dalam permintaan pasar lokal terjadi dan memukul UMKM lebih keras sebagai akibat dari meningkatnya pengangguran dan meningkatnya pekerja yang menerima pemotongan gaji. Selain itu, ketika pandemi menyebar ke seluruh dunia, terjadi penurunan permintaan global yang berdampak pada penurunan ekspor Indonesia (Asian Development Bank 2020).

Tantangan juga diperparah oleh kurangnya sumber daya mentah dan infrastruktur transportasi. Akibat regulasi COVID-19, beberapa wilayah mengalami gangguan bisnis dan pembatasan perjalanan. Beberapa UMKM juga mengalami kekurangan pasokan dan masalah pengiriman barang jadi karena terkendala dengan bahan input. Menurut laporan gabungan UNDP dan LPEM dari FEB UI (2020), pandemi menjadi faktor lebih dari 45% masalah distribusi dan akses UMKM terhadap bahan baku. Masalah impor bahan baku dan bahan pembantu, terutama dari China, juga memaksa beberapa UMKM untuk mengurangi atau menghentikan operasinya.

Setelah penguncian berat dilonggarkan, aturan pemerintah daerah diterapkan di Indonesia, yang mengarah ke penguncian dan pembatasan sebagian. Kebijakan negara tersebut terus memberikan dampak yang merugikan bagi dunia usaha, terutama bagi UMKM yang masih melakukan sebagian besar kegiatan operasionalnya secara offline. Menurut data Bank Indonesia per Maret 2021, wabah COVID-19 berdampak pada 87 persen UMKM, dan mayoritas UMKM tersebut mengalami penurunan penjualan yang tajam. Bahkan sebelum pandemi, pemerintah memiliki agenda adopsi digital dan UMKM sebagai cara untuk memperkuat UMKM dengan memperluas jangkauan pasar mereka. Namun, beberapa UMKM mengalami kesulitan untuk beralih ke platform digital karena kurangnya pengalaman menavigasi digitalisasi UMKM dan tidak adanya infrastruktur internet di beberapa wilayah di Indonesia. UMKM harus berimprovisasi untuk bertahan hidup karena keterbatasan fisik yang parah akibat epidemi. Ini termasuk beralih ke pasar online. Pasca pandemi, hampir 44 persen UMKM yang disurvei UNDP & LPEM FEB UI (2020) bergabung dengan online marketplace atau platform e-commerce, padahal sebelumnya hanya 28 persen UMKM yang pernah melakukannya. Selain itu, 15,9 juta UMKM, atau 24,9% dari seluruh UMKM, telah terlibat dalam ekosistem digital pada Oktober 2021. (Afifa 2021). Namun, digitalisasi UMKM yang berkembang juga dapat berdampak negatif pada banyak perusahaan yang hanya beroperasi secara offline.

4. Dukungan Pemerintah

Pemerintah Indonesia memulai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ditujukan untuk berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM, untuk mengurangi dampak epidemi terhadap UMKM. Tabel 1 daftar program PEN untuk UMKM secara rinci. Komponen keuangan usaha UMKM terutama menjadi fokus inisiatif dukungan.

Tahun 2020 terdapat dana program PEN sebesar Rp695,2 triliun yang diberikan oleh pemerintah pusat Indonesia, di mana Rp123,46 triliun di antaranya diperuntukkan khusus untuk pemulihan usaha UMKM dan mitigasi dampak pandemi (Kementerian Keuangan, 2020). Sebanyak Rp30,22 triliun telah didistribusikan kepada penerima manfaat pada Q2 tahun 2020. Hanya tambahan Rp0,98 triliun disalurkan pada bulan Juli, dan pengeluaran tambahan yang besar sekali lagi terlihat pada bulan Agustus dan September. Baru pada akhir tahun 2020 realisasi pendanaan program PEN mengejar dan mencapai 82,83 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dari sisi dana PEN untuk UMKM, Rp112,44 triliun atau lebih dari 90% dari alokasi anggaran telah disalurkan ke tahun 2020. Berikut beberapa rangkuman terkait program yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hasil tinjauan Pustaka (Andayani et al., 2021; Emiliani et al., 2021; Gitiyarko, 2020; Handini & Choiriyati, 2021; Hanim et al., 2022; Islami et al., 2021; Jayani, 2020; Marlinah, 2021; Masruroh et al., 2021; Mujianto et al., 2022; kemenkeu, 2020).

1) Penundaan pembayaran pokok dan bunga pinjaman

Penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin cepat menyebabkan turunnya kegiatan ekonomi dan kegiatan usaha, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi badan usaha yang terdampak Covid-19, pemerintah telah memutuskan untuk membebaskan pembayaran bunga dan menunda angsuran KUR paling lama 6 (enam) bulan dalam upaya membantu UMKM. Menyusul penangguhan pembayaran bunga dan penangguhan pembayaran pokok KUR, peraturan KUR juga akan dilonggarkan dengan menambah waktu dan pagu yang lebih tinggi.

Pada 8 April 2020, Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pembiayaan UMKM memutuskan untuk melonggarkan aturan KUR dan batas waktu pembayaran bunga dan pokok. Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua OJK, Kepala BPKP, dan Eselon Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 1 orang pejabat yang mewakili Menteri sebagai anggota Komite Pembiayaan UMKM, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pembiayaan UMKM.

“1 April 2020 akan menandai penerapan kebijakan ini. Yang akan mendapatkan pembebasan bunga dan penundaan pembayaran cicilan pokok KUR maksimal 6 bulan harus lulus evaluasi dari masing-masing penyalur KUR” Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 yang antara lain menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan atas kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum atau sesudah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk para debitur UMKM semakin menguatkan hal tersebut.

Bagi debitur KUR eksisting yang terdampak Covid-19, Menko Perekonomian lebih lanjut menggarisbawahi bahwa ketentuan restrukturisasi KUR akan dilonggarkan dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau kebijakan menaikkan pagu KUR (khusus KUR Kecil). debitur KUR dan KUR Mikro Non Produksi).

Prosedur administrasi pengajuan KUR, seperti pengurusan Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan, dilonggarkan bagi calon debitur KUR baru. Sampai keadaan mengizinkan, semua dokumen ini untuk sementara ditangguhkan. Selain itu, KUR tersedia secara online.

2) Insentif Pajak

Bagi UMKM, keuntungan pajak program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih tersedia hingga tahun 2022, menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah telah menawarkan

insentif pajak PEN kepada UMKM sejak pandemi dimulai hingga Desember 2021 berupa pembebasan tarif pajak penghasilan final (PPh) sebesar 0,5 persen.

3) Subsidi Bunga Kredit UMKM

Usaha kecil menengah (UMKM) termasuk kategori yang paling terkena dampak wabah Covid-19 (UMKM). UMKM bergumul dengan isu-isu seperti omset yang menurun dan pasokan material yang terganggu, hingga modal yang terancam kelangkaan.

Berdasarkan POJK 11/POJK.02/2020, rencana restrukturisasi yang mencakup kebijakan untuk stimulasi subsidi bunga, peningkatan subsidi bunga, bantuan sosial tunai yang meningkatkan daya beli, dan bantuan dari rencana pemulihan ekonomi nasional lainnya.

Selama pandemi, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp 162,40 triliun untuk sektor UMKM dan korporasi, mendorong peluncuran portal indonesia.go.id dalam upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Pemerintah bahkan telah berkomitmen untuk mengalokasikan pinjaman pembiayaan perbankan hingga 30% dari total pinjaman agar dapat terus membantu dan mendorong sektor UMKM untuk berkembang. Secara alami, jumlah tersebut akan dibagikan secara bertahap hingga 2024.

Tindakan Menteri Keuangan ini merupakan bentuk afirmasi yang lebih langsung kepada sektor dari sekadar pinjaman perbankan. Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 150/PMK.05/2021 ini diterbitkan oleh Menteri Keuangan. PMK menyebutkan, UMKM akan tetap mendapat subsidi bunga dan margin kredit hingga 31 Desember 2021.

Batas pinjaman tertinggi untuk UMKM adalah Rp 10 miliar, dan ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan subsidi bunga atau margin kredit. Sangat penting untuk diingat bahwa klien yang menerima subsidi bunga pinjaman termasuk dalam kategori saat ini per 29 Februari 2020.

4) Dana Insentif Daerah (DID)

Sebagai salah satu langkah percepatan kebangkitan ekonomi, pemerintah kembali menggelontorkan Dana Insentif Daerah (DID). Namun, untuk mendapatkan tambahan DID, pemerintah daerah harus mempertimbangkan sejumlah pertimbangan.

Tuntutan tersebut antara lain mengajukan perubahan APBD 2020 sesuai PMK 35/PMK.07/2020. Kedua, laporan belanja kesehatan dan laporan belanja bantuan sosial berdasarkan PMK 19/PMK.07/2020 dan PMK 35/PMK.07/2020 dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

Setelah deklarasi kelayakan, evaluasi akan dilakukan. Kabupaten/Kota yang mempertahankan zona hijau dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kabupaten/Kota yang beralih dari zona merah ke zona hijau dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh nilai minimal 80 dalam perhitungan perkembangan skor epidemiologi merupakan salah satu kriteria penilaian. Dirjen Perimbangan Keuangan sebelumnya menyatakan penilaian DID kali ini sudah selesai. Itu tergantung bagaimana pengendalian Covid-19 dikelola di masing-masing daerah.

5) Stimulus Modal Kerja

Peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional secara resmi diluncurkan oleh sejumlah menteri, wakil menteri, dan anggota direksi (PEN) bank. Acara yang berlangsung baik secara tatap muka maupun digital ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat peluncuran program PEN bagi UMKM. Jaminan pinjaman modal kerja berkisar antara Rp. 100 sampai Rp. 600 juta dan diberikan oleh berbagai bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

Mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia khususnya pada triwulan II, PEN diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian negara pada triwulan III dan IV. Oleh karena itu UMKM mendapat prioritas dari pemerintah dalam inisiatif PEN, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam rangka pemulihan ekonomi, program PEN dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan, termasuk penjaminan pinjaman bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Melalui PMK 71/2020, diatur

rencana penjaminan kredit modal kerja UMKM, dan ditunjuk PT Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai penjamin. Pemerintah mendukung PT Jamkrindo dan PT Askrindo dengan membayar Iuran Jasa Penjaminan (IJP), pembatasan kerugian, dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dalam konteks PEN, tujuan penjaminan kredit modal kerja adalah untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha sektor riil dan keuangan untuk beroperasi secara menguntungkan. Sebagai dampak dari wabah COVID-19, penjaminan ini juga dimaksudkan untuk menurunkan risiko kredit bagi pelaku UMKM dan mendorong transfer pinjaman modal kerja dari bank ke UMKM.

Pemerintah telah merencanakan sejumlah langkah stimulus dengan cermat, namun implementasinya juga harus cepat dan tepat. Inisiatif ini dilakukan untuk menghentikan PHK lebih lanjut dan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi.² Pemerintah telah menyediakan menu yang lengkap untuk membantu UMKM kembali *on track*, produktif, dan tetap terlindungi dari COVID sehingga bisa kembali memutar roda perekonomian khususnya di tingkat lokal.³

Pemerintah telah mengalokasikan hingga 21% dari anggaran PEN untuk membantu UMKM yang terkena dampak wabah COVID-19. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu salah satu industri yang menjadi tumpuan perekonomian Indonesia. Total anggaran UMKM di bawah PEN sebesar Rp 123,46 triliun, di antaranya Rp 35,28 triliun untuk subsidi bunga, Rp 78,78 triliun untuk penempatan dana restrukturisasi kredit, Rp 5 triliun untuk IJP, Rp 1 triliun untuk pembiayaan investasi koperasi melalui UMKM. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB), dan Rp 1 triliun untuk PPh Akhir MS ditanggung pemerintah.

Pendistribusian sumber daya semua dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya untuk merangsang perekonomian. Program PEN banyak membantu dunia usaha, khususnya UMKM. Harapannya semua sektor usaha di Indonesia segera pulih kembali. berperan sebagai mesin perekonomian negara.⁴

6) Penempatan dana negara di bank

Menurut Menteri Keuangan, penempatan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di perbankan sebesar Rp. 66,7 triliun dengan *multiplier impact* sebesar Rp. 218,9 triliun dalam bentuk dukungan finansial untuk UMKM. Menteri keuangan mengatakan, Surat Berharga Negara (SBN) khusus hasil kerja sama pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) yang termasuk produk non-publik, menyediakan pembiayaan untuk penggelaran dana di sektor perbankan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Sesi I Tahun Sidang 2021–2022 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan.

Namun, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku menyimpan uang di bank bukanlah solusi jangka panjang. Bahkan, Sri Mulyani mengaku transaksi tersebut harus dilaporkan sebagai transaksi *cash management* atau transaksi non anggaran karena adanya pergeseran tahun anggaran dalam satu tahun anggaran.

Pada akhir tahun 2020, penempatan uang tersebut akan dimasukkan ke dalam SILPA (sisa pembiayaan anggaran), lanjutnya. Selain disimpan di perbankan, masih ada dana SBN hasil kerja sama BI dengan pemerintah sebesar Rp 57,1 triliun untuk PEN yang tidak digunakan pada tahun anggaran 2020. Insentif bagi tenaga medis, pengeluaran terkait perawatan pasien, dan bantuan bagi UMKM berupa potongan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR pada tahun 2021. Dengan cadangan uang tersebut, lanjut Sri, Indonesia termasuk salah satu negara yang sedikit. yang telah mampu membeli vaksin Covid-19 sebelum tahap akhir produksi.

“Ini berkat bantuan dan pembiayaan DPR yang diberikan langsung kepada Bank Indonesia oleh SBN. Karena itu, Indonesia mampu mengimunisasi bahkan lebih awal dari negara-negara sekitarnya”⁵

² Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

³ Sri Mulyani Indrawati, menteri keuangan, 2020

⁴ ibid

⁵ ibid

Uang tunai SILPA TA 2020 sebesar Rp245,6 triliun akan digunakan untuk membiayai sumber-sumber SAL yang berjumlah Rp139,4 triliun pada tahun 2021. Menurut Sri, uang itu digunakan untuk menutupi berbagai pengeluaran terkait kenaikan Covid-19 yang ditimbulkan oleh Variasi delta tahun ini. Selain itu, dia mengatakan bahwa SAL 2021 dari SILPA tahun sebelumnya beroperasi sebagai cadangan fiskal atau penyangga fiskal yang dapat dipercaya dan efektif dan dapat menurunkan penerbitan obligasi pemerintah. "Untuk mengurangi beban kenaikan suku bunga di saat kita harus menjalankan defisit besar-besaran. Selain itu, dari segi pendanaan investasi yang penting,"⁶

7) Dana produktif bantuan presiden

Dalam rangka penyaluran Bantuan Presiden Produktif (Banpres) berupa program Bantuan Usaha Mikro Produktif (BPUM) pada tahun 2021, pemerintah kembali menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI. Pada hari Jumat, 30 Juli 2021, penyaluran BPUM 2021 resmi berlangsung di Istana Negara Jakarta dengan ketentuan kesehatan yang sangat ketat. Hadir dalam acara tersebut Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI, dan perwakilan penerima manfaat. Perwakilan penerima manfaat dari empat outlet BNI di Medan, Tasikmalaya, Pasuruan, dan Denpasar yang terkoneksi secara online juga hadir dalam acara tersebut. "Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan lampu hijau kepada BNI untuk menyalurkan Rp 1,2 juta per orang pada tahun 2021 dalam bentuk Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro. Pengusaha yang dipilih oleh Kementerian Koperasi & UKM sebagai penerima manfaat. 2,1 juta pemenang adalah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Karena dapat menawarkan sistem distribusi yang terintegrasi dengan baik, dari pembukaan rekening komunal hingga tahap *monitoring* pencairan, dipilihlah BNI sebagai bank penyalur. BNI dapat lebih mempermudah proses pembukaan rekening bagi penerima (menggunakan sistem burekol atau dengan membuka rekening kolektif) sehingga penerima hanya perlu menyelesaikan proses aktivasi rekening sebelum mengambil kartu debit dan buku tabungan dari lokasi BNI.

Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, maka bantuan tersebut dapat langsung digunakan untuk kegiatan produktif (PEN). Seluruh cabang BNI memiliki area khusus untuk proses aktivasi rekening. Selain itu, BNI akan menawarkan lokasi khusus aktivasi rekening untuk wilayah yang jaraknya cukup jauh dari cabang BNI terdekat. Seluruh layanan BNI mengikuti regulasi kesehatan dan memiliki sistem antrian yang sistematis. Selain itu, BNI juga memiliki pengetahuan tentang penyaluran program bansos atau bansos ke lingkungan sekitar. Pertama, BNI dan Kemensos bersinergi menyalurkan bantuan dana Program Keluarga Harapan yang telah berdampak pada 4,1 juta pengguna sejak 2016. Selain itu, BNI telah memberikan 5,5 juta nasabah dana bantuan Program Sembako sejak 2017.

Kedua, koordinasi Program Indonesia Pintar dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan dana kepada 3 juta peserta sejak 2012. Ketiga, bantuan administrasi Program Indonesia Pintar yang berdampak pada 1,5 juta siswa sejak 2018. Keempat, kerja dengan kantor pengelola proyek Kartu Prakerja untuk mendistribusikan Kartu Prakerja. BNI telah menyalurkan 8,4 juta penerima secara total sejak tahun 2020. Dalam hal ini, BNI merupakan satu-satunya bank yang terlibat dalam pengembangan sistem digital Pra Kerja. Kelima, membantu Badan Riset dan Inovasi Nasional/Kemenristek dalam memberikan bantuan kepada 818 ribu mahasiswa sejak 2018. Keenam, membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejak 2018, total 12.000 bantuan telah diberikan. Ketujuh, sejak tahun 2019, Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan sosial berupa benih kepada 1.709 kelompok tani. BNI menjamin keamanan nasabah dengan menjunjung tinggi standar keamanan data transaksi keuangan selain menawarkan fitur dan kemudahan dalam proses penyaluran bantuan. Royke menutup dengan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena terus mengakui BNI sebagai bank yang mampu menyalurkan berbagai program bansos,

⁶ ibid

banpres, dan subsidi. Upaya BNI dalam perannya sebagai agen pembangunan terlihat dalam semua perkembangan digitalisasi untuk penyediaan bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan program subsidi.

Untuk memenuhi 6T yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi, tambahnya, “BNI dituntut untuk menyukseskan setiap program pemerintah, termasuk memastikan semua bantuan sosial program, banpres, dan subsidi dibagikan secara *cashless*.”

5. Kesimpulan

Covid-19 menjadi bencana besar terhadap seluruh industry tanah air, tidak terkecuali UMKM. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, pemerintah harus mengambil Langkah strategis agar kegiatan ekonomi tetap berjalan di tengah merebaknya pandemic.

Terdapat beberapa program atau dukungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurangi benturan yang disebabkan oleh Covid-19 khususnya bagi UMKM. Berbagai dukungan tersebut berada di bawah naungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan tersebut di antaranya adalah penundaan pembayaran pokok dan bunga pinjaman, insentif pajak, subsidi bunga kredit UMKM, dana insentif daerah, stimulus modal kerja, Penempatan dana negara di bank, serta dana produktif bantuan dari presiden.

6. Daftar Pustaka

- ABDSI (2020, March 20). *Siaran pers ABDSI terkait antisipasi dan penanganan dampak pandemic Corona terhadap UMKM*. Asosiasi Business Development Services (BDS) Indonesia. <https://www.abdsi.id/siaran-pers-abdsi-terkait-antisipasi-dan-penanganan-dampak-pandemi-corona/>.
- Afifa, L. (2021, October 11). Digital transformation expands MSMEs in small towns. *Tempo.co*. <https://en.tempo.co/read/1515222/digital-transformation-expands-msmes-in-small-towns>.
- Andayani, I., Roesminingsih, M. V., & Yulianingsih, W. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1). <https://doi.org/10.17977/um041v16i1p12-20>
- Asian Development Bank. (2020). *Asia small and medium-sized enterprise monitor 2020: Volume I—Country and Regional Reviews*. <https://www.adb.org/publications/asia-sme-monitor-2020-country-regional-reviews>
- Ambrose, U. J. (2021). *Impact of Covid-19 pandemic on micro, small & medium enterprises in Nigeria (MSME)* (Thesis, Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos).
- Baldwin, R., & di Mauro, B. W. (Eds.) (2020). *Mitigating the covid economic crisis: act fast and do whatever it takes*. A CEPR Press VoxEU.org eBook. <https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes>.
- Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z. B., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. T. (2020). *How are small businesses adjusting to COVID-19? Early evidence from a survey*. NBER Working Paper, 26989. National Bureau of Economic Research. [doi:10.3386/w26989](https://doi.org/10.3386/w26989).
- Bhasin, B. B., & Venkataramany, S. (2010). *Globalization Of Entrepreneurship: Policy Considerations For SME Development In Indonesia*. *International Business & Economics Research Journal*.
- Cowling, M., Brown, R., & Rocha, A. (2020). *Did you save some cash for a rainy COVID-19 day? The crisis and SMEs*. *International Small Business Journal*, 38(7), 593- 604. [doi: https://doi.org/10.1177.0266242620945102](https://doi.org/10.1177.0266242620945102).
- Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N. N., Nurmahfidhoh, R., & Habib, M. A. F. (2021). ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19. *SOSEBI: Jurnal Penelitian*

- Gitiyarko, V. (2020). Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. In *Kompaspedia.Kompas.Id*.
- Gunadi, A. D., Lesmana, H., Fachrizah, H., Revindo, M. D., & Daniswara, R. V. (2021). *COVID-19 pandemic and MSMEs in Indonesia: Impact and policy responses*. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(2), 143-171. doi: <https://doi.org/10.52813/jei.v10i2.151>.
- Handini, V. A., & Choiriyati, W. (2021). Digitalisasi Umkm Sebagai Hasil Inovasi Dalam Komunikasi Pemasaran Sahabat Umkm Selama Pandemi Covid-19. *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 11(2). <https://doi.org/10.31506/jrk.v11i2.9682>
- Hanim, L., Soponyono, E., & Maryanto, M. (2022). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1452>
- Islami, N., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). Peran pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19. *Jurnal Karta Rahardja*, 2(1).
- ILO. (2020). *The clock is ticking for survival of Indonesian enterprises, jobs at risk: Key findings of the ILO SCORE Indonesia COVID-19 enterprise survey*. ILO Research Brief May 2020. International Labour Organization.
- Jayani, D. H. (2020). Pemerintah Beri Stimulus, Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Kuangan, Kementrian. 2020. *Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)*. (<https://www.kemenkeu.go.id/umi> diakses 13 januari 2021).
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4(2).
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK COVID-19 BAGI UMKM DI INDONESIA. *Journal of Innovation and Knowledge*, 1(1).
- Mujianto, M., Ramaditya, M., Mustika, M., Tanuraharjo, H. H., & Maronrong, R. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM Warung Ritel Tradisional di Indonesia dan Strategi Bertahannya. *Jurnal STEI Ekonomi*, 30(02). <https://doi.org/10.36406/jemi.v30i02.494>
<https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay/alma995076788402676/41ILOINST:41ILO1>.
- Reardon, T., Mishra, A., Nuthalapati, C. S., Bellemare, M. F., & Zilberman, D. (2020). *COVID-19's disruption of India's transformed food supply chains*. *Economic and Political Weekly*, 55(18), 18-22. <https://www.epw.in/journal/2020/18/commentary/covid-19s-disruption-indias-transformed-food.html>.
- Revindo, M. D., Gan, C., & Nguyen, C. (2017). *Internationalization strategy and process: Evidence from Indonesian SMEs*. *World Journal of Management*, 8(1), 59-74. doi: <https://doi.org/10.21102/wjm.2017.03.81.05>.
- Revindo, M. D., & Gan, C. (2017). *Rural microfinance banking viability and outreach: a case of Bank Rakyat Indonesia*. In C. Gan, & G. V. Nartea, *Microfinance in Asia*, World Scientific (pp. 337-356). doi: https://doi.org/10.1142/9789813147959_0011.
- Rekart, E., Doktoralina, C. M., & Saluy, A. B. (2018). *Development Model of Marketing Capabilities and Export Performance of SMEs: A Proposed Study*. *European Journal of Business and Management*.
- Rosalina, V., Hamdan, & Harsiti. (2019). *Pengenalan Aplikasi Electronic Customer Relationship Management (E-Crm) Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Desa Harjatani*. *Jurnal Kuat*.
- Sandee, H. M., Kities Andadari, R., & Sulandjari, S. (2000). *Small firm development during good times and bad: the Jepara furniture industry*. In C. Manning, & P. van Diermen (Eds.), *Indonesia in transition. Social aspects of reformasi and crisis*, Institute of Southeast Asian Studies/ZED Books (pp. 184-200).

- Shafi, M., Liu, J., & Ren, W. (2020). *Impact of COVID-19 pandemic on micro, small, and medium-sized Enterprises operating in Pakistan*. *Research in Globalization*, 2, 100018. doi: <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2020.100018>.
- Santhirakumar, S., Narmilan, A., & Puvanitha, N. (2021). *The economic impact of Covid-19 on the micro, small and medium enterprise (MSME) sector in Batticaloa district, Sri Lanka*. *Annual Research Journal Ministry of Labour 2020 [Covid-19 : labour issues and responses]* (pp. 27-41)
- Sonobe, T., Takeda, A., Yoshida, S., & Truong, H. T. (2021). *The impacts of the Covid-19 pandemic on micro, small, and medium enterprises in Asia and their digitalization responses*. ADBI Working Paper, 1241. Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/publications/impacts-covid-19-pandemic-msme-asia-their-digitalization-responses>.
- Sulistiyani, E., & Rahardja, E. (2018). *Examining the Effect of Transformational Leadership, Extrinsic Reward, and Knowledge Sharing on Creative Performance of Indonesian SMEs*. *Quality-Access to Success*, 63-67.
- Tambunan, T. (2009). *Export-oriented small and medium industry clusters in Indonesia*. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 3(1), 25-58. doi: <https://doi.org/10.1108/17506200910943661>.
- Tambunan, T. T. (2019). *The impact of the economic crisis on micro, small, and medium enterprises and their crisis mitigation measures in Southeast Asia with reference to Indonesia*. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 6(1), 19-39. doi: <https://doi.org/10.1002/app5.264>.
- Tambunan, T. (2020). *MSMEs in times of crisis. evidence from Indonesia*. *JDE (Journal of Developing Economies)*, 5(2), 89-102. doi: <https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.20848>.
- The Strait Times. (2020, August 7). *Indonesian micro, small and medium-sized enterprises struggle to survive as revenues are hit*. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-smes-struggle-to-survive-as-sales-revenue-plunge-with-covid-19-pandemic>.
- UNIDO. (2021). *Impact assessment of Covid-19 on Indonesia's manufacturing firms: survey result May-June*. United Nations Industrial Development Organization. [https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-03/UNIDO%20COVID19%20Assessment Indonesia FINAL.pdf](https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-03/UNIDO%20COVID19%20Assessment%20Indonesia%20FINAL.pdf).
- UNDP & LPEM FEB UI. (2020). *Impact of COVID-19 pandemic on MSMEs in Indonesia*. Report. The Institute for Economic and Social Research (LPEM-FEB UI) and the United Nations Programme (UNDP-Indonesia). <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/library/ImpactofCOVID19MSMEs.html>.
- Kemenkeu (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. In *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*.
- World Bank & Bappenas. (2021). *Covid-19 impact on firms in Indonesia: panel analysis wave 1 to wave 3 of business pulse survey: Results from the Covid-19 business pulse survey*. PowerPoint Presentation. World Bank & Bappenas. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/a3bd7bdd3f21b3906f7dc50a25925f09-0070012021/original/Firms-March2021.pdf>.
- Wengel, J. t., & Rodriguez, E. (2006). *SME export performance in Indonesia after the crisis*. *Small Business Economics*, 26(1), 25-37. doi: [10.1007/s11187-004-6491-y](https://doi.org/10.1007/s11187-004-6491-y).